

Perempuan dan Demokrasi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi

Artikel

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

Anna Margret

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

Dewi Komalasari

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Atnike Nova Sigiro

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/ Kota Kawasan Timur Indonesia

Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

Fathimah Fildzah Izzati

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/ Kota Periode 2014-2019

Andi Misbahul Pratiwi

Diterbitkan oleh:

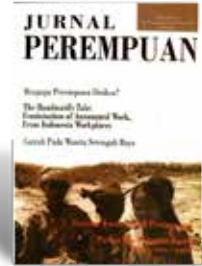
YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

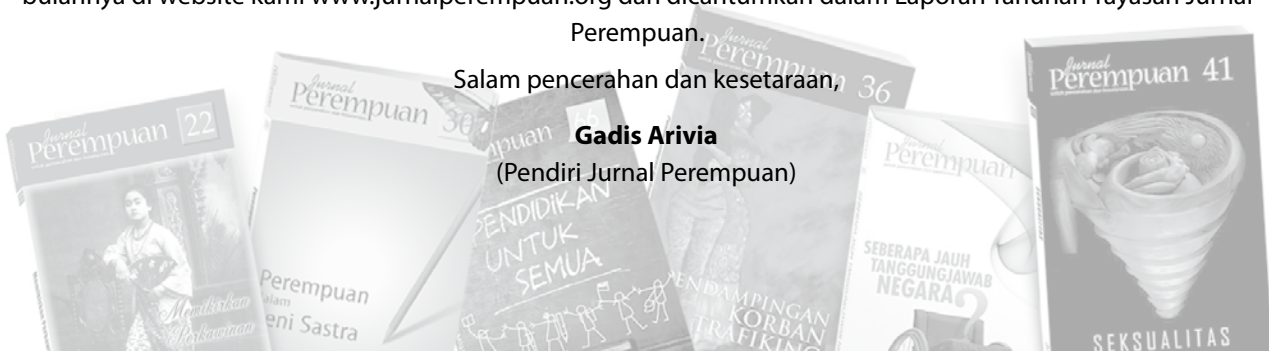
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigirow

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigirow (Pascasarjana Diplomasi,
Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

EDITOR TAMU

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universiteit
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian
Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender,
Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi,
Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat,
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Dewi Komalasari
Nadya Nariswari Nayadheyu
Rahel Narda Chaterine

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Edisi revisi, cetakan pertama, September 2019

Cetakan Pertama, Mei 2019

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi / Women and Democracy iii

Artikel

- Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis / *Two Decades of Indonesian Democracy and Diminishing Feminist Agenda* 89-100
Anna Margret
- Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan / *The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament* 101-113
Dewi Komalasari
- Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia / *Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia* 115-123
Atnike Nova Sigiro
- Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia / *Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia* 125-139
Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina
- Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan / *The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women* 141-150
Fathimah Fildzah Izzati
- Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019 / *Policies, Practices & Politics of Women's Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019* 151-163
Andi Misbahul Pratiwi

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Perempuan dan Demokrasi *Women and Democracy*

Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik.

Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen.

Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair, cenderung oportunistik dan gampang bubar ini membuat pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.

Oleh karena itu, wajah DPR saat ini diisi oleh kalangan yang memiliki latar belakang sebagai elite ekonomi (pengusaha) dan memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik. Lembaga pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan menjadi rentan terhadap kepentingan oligarki. Praktik korupsi politik menyebar dan menjadi persoalan besar di Indonesia. Pemilu

seharusnya menawarkan pilihan yang beragam di antara gagasan-gagasan yang bersaing. Namun yang terjadi saat ini pilihan itu menyusut, perbedaan antar partai menjadi kabur, dan pemilih tidak dapat meminta pertanggungjawaban politisi atas tindakan mereka.

Jika demokrasi dilihat sebatas yang terjadi di parlemen, maka definisi demokrasi menjadi sempit. Demokrasi bukan hanya sebatas pemilu, ia mencakup adanya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berserikat, adanya perlindungan bagi minoritas, serta mencakup aspek sosial dan ekonomi, bukan hanya politik. Sejumlah kalangan bahkan memandang bahwa demokratisasi Indonesia saat ini sedang mengalami kebuntuan. Fenomena ini dapat dilihat misalnya pada penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang kian masif. UU ITE telah menjerat Baiq Nuril, perempuan penyintas kekerasan seksual yang divonis bersalah dan diganjar hukuman alih-alih mendapatkan perlindungan.

Demokrasi Indonesia cenderung terpusat pada Jakarta dan yang terjadi di Jawa, sehingga aspirasi di tingkat lokal sering kali diabaikan. Sementara tantangan dan perjuangan demokrasi juga terjadi di tingkat lokal. Di daerah dapat ditemukan kasus masyarakat yang berusaha memperjuangkan hak-hak sosialnya justru rentan menghadapi ancaman kriminalisasi, seperti perempuan Kendeng di Jawa Tengah, aktivis Eva Bande di Sulawesi Tengah. Otonomi daerah sebagai buah dari reformasi dirayakan hanya sebatas pilkada langsung. Ia belum sepenuhnya dimaknai dalam kerangka manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, perlindungan dan pemajuan HAM, hak atas pembangunan, dan pemajuan hak-hak perempuan.

Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini menunjukkan perlunya intervensi terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi elektoral agar demokrasi yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dapat terwujud. Di sisi lain tantangan yang dihadapi gerakan perempuan akan semakin kompleks dengan munculnya kandidat perempuan konservatif yang mengusung gagasan-gagasan yang menolak agenda feminis. Untuk itu menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan agenda feminis menjadi penting dalam proses konsolidasi demokrasi. **(Anita Dhewy)**

Anna Margret (Cakra Wikara Indonesia & Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

Two Decades of Indonesia's Democracy and the Fading of Feminist Agenda

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 89-100, 20 daftar pustaka

This article explores the complexity of the relationship between democracy and feminism in both theory and practice. For a long time, feminist theorists have put forward criticism of democratic studies, which emphasize the importance of transforming political institutions and addressing the measure of the goodness of democracy that is considered to be generally accepted. As a result, the voice and interests of women are considered merely complementary and not a priority. Feminist agendas - marked by the formulation of interests aimed at challenging patriarchy in a variety of manifestations - are increasingly scarce in the work of fighting for democracy in Indonesia, especially in the participation of women's electoral politics. While non-electoral participation is more indicative of the presence of a feminist agenda, the challenge lies in the lack of linkages with electoral politics. The achievements of democracy over the past 20 years show the lack of contribution of democracy to the struggle that the women's movement formulated with the breath of feminism. This article highlights the increasingly eroded feminist agenda in the consolidation of democracy in Indonesia. It is time for the consolidation of democracy to borrow the logic of feminism, which rejects the public/private; personal/political dichotomy; in the electoral/non-electoral political struggle.

Keywords: feminist agenda, electoral, non-electoral, democracy

Artikel ini mengeksplorasi kerumitan hubungan antara demokrasi dan feminisme baik dalam teori maupun praktik. Sejak lama, teoretisi feminis telah mengajukan kritik terhadap kajian demokrasi yang menekankan pentingnya transformasi kelembagaan politik dan mengedepankan ukuran kebaikan demokrasi yang dianggap berlaku universal. Akibatnya, suara dan kepentingan perempuan dianggap pelengkap semata dan bukan prioritas. Agenda feminis—ditandai oleh perumusan kepentingan yang bertujuan menantang patriarki dalam beragam manifestasi—semakin langka ditemukan dalam geliat kerja-kerja memperjuangkan demokrasi di Indonesia, terutama dalam partisipasi politik elektoral perempuan. Sementara partisipasi non elektoral lebih menunjukkan hadirnya agenda feminis, tantangannya ada pada minimnya ketersambungan dengan politik elektoral. Capaian demokrasi selama 20 tahun terakhir menunjukkan minimnya kontribusi demokrasi terhadap perjuangan yang dirumuskan gerakan perempuan dengan nafas feminisme. Artikel ini menyoroti semakin tergerusnya agenda feminis dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ini saatnya konsolidasi demokrasi meminjam logika feminisme yang menolak dikotomi publik/privat; personal/politikal; dalam perjuangan politik elektoral/non elektoral.

Kata kunci: agenda feminis, elektoral, non elektoral, demokrasi

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 101-113, 2 tabel, 15 daftar pustaka

The representation of women's interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This article reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks.

Keywords: parliamentary political economy, elections, clientalism, patronage, women candidate, women in parliament

Perwakilan kepentingan perempuan melalui anggota parlemen perempuan tercapai jika terdapat keterhubungan antara konstituen dengan anggota parlemen. Agar dapat menjalin kerjasama maka dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai perilaku mereka. Artikel ini mengungkapkan ragam jalinan relasi dan afiliasi ekonomi politik yang melingkupi anggota parlemen perempuan. Jalinan relasi yang terbangun sejak masa pencalonan hingga menjadi anggota parlemen tersebut pada gilirannya memunculkan berbagai kepentingan dan tekanan yang harus direspons oleh anggota parlemen perempuan. Dengan memahami berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi anggota parlemen perempuan, masyarakat sipil dapat merancang rencana aksi yang memicu respons positif mereka sehingga meminimalkan potensi risiko.

Kata kunci: ekonomi politik parlemen, pemilu, klientalisme, patronase, kandidat perempuan, perempuan di parlemen

Atnike Nova Sigiuro (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 115-123, 2 boks, 19 daftar pustaka

Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House of Representative/DPR) and at the regional level (Regional House of Representatives/DPRD). However, the issue of women's representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where women's political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how women's organizations and parliamentarians are critical actors that encourage women's involvement with parliament. This article explains how the involvement between women's organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. The article is developed based on studies on engagement models of MAMPU's partners with the DPR and DPRD.

Keywords: women's politics, political representation, parliamentary women, women's representation

Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Namun, persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors' atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan menjelaskan bagaimana organisasi perempuan dan anggota parlemen menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa mitra MAMPU dengan DPR dan DPRD.

Kata kunci: politik perempuan, representasi politik, perempuan parlemen, representasi perempuan

¹Abdul Madjid Sallatu, ¹Rahmadani, ¹Agussalim & ²Abby Gina
(¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin (P3KG-UNHAS), Makassar, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia

Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 125-139, 7 tabel, 9 daftar pustaka

Representation of women in the legislature is important. The presence of women members of parliament (MPs) does not only balance the number of parliamentarians (gender balance), but also encourages women's issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislator's portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done through document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for women's political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia.

Keywords: women members of parliament, women's representation, gender-sensitive policies

Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. Kehadiran Anggota Parlemen Perempuan (APP) tidak sekadar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan Indonesia Timur yaitu: Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian

ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di Kawasan Timur Indonesia.

Kata kunci: Anggota Parlemen Perempuan, representasi perempuan, kebijakan sensitif gender.

Fathimah Fildzah Izzati (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Indonesia)

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 141-150, 42 daftar pustaka

Women never make choices about their work democratically. In patriarchal society, "women's work" is constructed as work that is in the area of social reproduction and is "natural" for women. Consequently, women are increasingly in a vulnerable position in the labor market. In addition, women also face obstacles to being actively involved in various democratic spaces such as unions and women's movements, and wider social movements because they bear a double workload that is life-consuming. However, various women's empowerment programs launched by a number of development institutions to overcome the problems faced by women turned out to be far from women's interests. Empowerment, also known as "liberal empowerment", actually depoliticized and atomized women. Feminist scholars also call for the importance of realizing "liberating empowerment". Related to that, this paper sees that the process of democratization of work on women's work is an effort that can be done to pave the way for women's liberation.

Keywords: women's work, democratization of work, empowerment, liberals, liberation

Perempuan tidak pernah menentukan pilihan atas kerja mereka secara demokratis. Dalam masyarakat patriarkal, "kerja perempuan" dikonstruksikan sebagai kerja-kerja yang berada di wilayah reproduksi sosial dan bersifat 'kodrat' bagi perempuan. Konsekuensinya, perempuan semakin berada pada posisi yang rentan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, perempuan juga menghadapi kendala untuk terlibat aktif dalam berbagai ruang demokrasi seperti serikat dan gerakan perempuan, dan gerakan sosial yang lebih luas karena menanggung beban kerja ganda yang menyita hidup. Namun, berbagai program pemberdayaan perempuan yang diluncurkan oleh sejumlah institusi pembangunan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan ternyata masih jauh dari kepentingan perempuan. Pemberdayaan yang disebut juga sebagai "pemberdayaan yang liberal" tersebut malah mendepolitisasi dan mengatomisasi perempuan. Para sarjana feminis pun menyerukan pentingnya mewujudkan "pemberdayaan yang membebaskan". Terkait itu, tulisan ini melihat bahwa proses demokratisasi kerja atas kerja perempuan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membuka jalan bagi pembebasan perempuan.

Kata kunci: kerja perempuan, demokratisasi kerja, pemberdayaan, liberal, membebaskan

Andi Misbahul Pratiwi (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019

Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 151-163, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Political parties play an important role as a gateway to women's representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs. Therefore, the policies, practices and politics in the political party determine the face of women's representation in parliament. This study focuses on policy, practice and politics in political parties in the context of encouraging women's representation in regency/city-level legislative council in Indonesia. This research explores the strategy experience and challenges faced by women legislative members in regency/city-level legislative council for the 2014-2019 period of the four parties that passed to parliament in the 2014 elections, namely PDIP, Golkar, Gerindra and one Islamic party, PPP. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussion and document review of articles of association/bylaws (AD/ART) of political parties. The results showed that 1) AD/ART of a number of political parties has adopted a 30% quota affirmative policy for party management structures and the formation of women's party wing organizations; 2) the practices of affirmative action policies in the process of recruitment, candidacy and political campaigns have not yet fully adopted the ideology of gender mainstreaming; knowledge, programs and decisions of political parties as well as competition between legislative candidates in competing for votes are still gender biased, thus detrimental to women's political agenda; 3) Parliamentary women experience psychological violence and intimidation in pushing the political agenda of women in parliament - rooted in patriarchal ideology, while the women's wing have not standing for women's agenda.

Keywords: women in parliament, women's political agenda, regency/city-level legislative council, women and political parties, substantive representation

Partai politik memainkan peran penting sebagai pintu gerbang keterwakilan perempuan. Di partai politik seluruh pertarungan memenangkan kursi di parlemen terjadi. Oleh karena itu, kebijakan, praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini berfokus pada kebijakan, praktik dan politik di partai politik dalam konteks mendorong keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggali pengalaman strategi dan tantangan yang dihadapi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten/kota periode 2014-2019 dari empat partai yang lolos ke parlemen pada pemilu 2014 yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan satu partai Islam, PPP. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terarah dan kajian dokumen AD/ART partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sejumlah partai telah mengadopsi kebijakan afirmatif kuota 30% dalam AD/ART untuk struktur pengurus partai dan pembentukan organisasi sayap perempuan partai; 2) Praktik dari kebijakan afirmatif dalam proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik belum mengadopsi ideologi pengarusutamaan gender secara signifikan; pengetahuan, program dan keputusan partai politik serta persaingan antar calon legislatif dalam memperebutkan suara masih bias gender, sehingga merugikan agenda politik perempuan; 3) Perempuan parlemen mengalami kekerasan psikis dan intimidasi dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen—yang berakar pada ideologi patriarki, sementara itu organisasi sayap partai belum menunjukkan keberpihakan substantif.

Kata kunci: anggota legislatif perempuan, politik perempuan, DPRD kabupaten/kota, perempuan dan partai politik, keterwakilan substantif

Problem “Kerja Perempuan” dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

The Problem of “Women’s Work” and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women

Fathimah Fildzah Izzati

Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Gedung Widya Graha LIPI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.10, Jakarta Selatan 12710, Indonesia

fathimafildza@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 30 April 2019, direvisi 24 Mei 2019, diputuskan diterima 29 Mei 2019

Abstract

Women never make choices about their work democratically. In patriarchal society, “women’s work” is constructed as work that is in the area of social reproduction and is “natural” for women. Consequently, women are increasingly in a vulnerable position in the labor market. In addition, women also face obstacles to being actively involved in various democratic spaces such as unions and women’s movements, and wider social movements because they bear a double workload that is life-consuming. However, various women’s empowerment programs launched by a number of development institutions to overcome the problems faced by women turned out to be far from women’s interests. Empowerment, also known as “liberal empowerment”, actually depoliticized and atomized women. Feminist scholars also call for the importance of realizing “liberating empowerment”. Related to that, this paper sees that the process of democratization of work on women’s work is an effort that can be done to pave the way for women’s liberation.

Keywords: women’s work, democratization of work, empowerment, liberals, liberation

Abstrak

Perempuan tidak pernah menentukan pilihan atas kerja mereka secara demokratis. Dalam masyarakat patriarkal, ‘kerja perempuan’ dikonstruksikan sebagai kerja-kerja yang berada di wilayah reproduksi sosial dan bersifat ‘kodrati’ bagi perempuan. Konsekuensinya, perempuan semakin berada pada posisi yang rentan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, perempuan juga menghadapi kendala untuk terlibat aktif dalam berbagai ruang demokrasi seperti serikat dan gerakan perempuan, dan gerakan sosial yang lebih luas karena menanggung beban kerja ganda yang menyita hidup. Namun, berbagai program pemberdayaan perempuan yang diluncurkan oleh sejumlah institusi pembangunan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan ternyata masih jauh dari kepentingan perempuan. Pemberdayaan yang disebut juga sebagai ‘pemberdayaan yang liberal’ tersebut malah mendepolitisasi dan mengatomisasi perempuan. Para sarjana feminis pun menyerukan pentingnya mewujudkan ‘pemberdayaan yang membebaskan’. Terkait itu, tulisan ini melihat bahwa proses demokratisasi kerja atas ‘kerja perempuan’ merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membuka jalan bagi pembebasan perempuan.

Kata kunci: kerja perempuan, demokratisasi kerja, pemberdayaan, liberal, membebaskan

Pendahuluan

Persoalan kerja selalu dipandang sebagai persoalan apolitis yang tak berkaitan dengan relasi sosial lainnya di dalam masyarakat. Kerja kerap kali hanya dimaknai sebagai cara manusia mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup semata daripada sebagai sebuah konvensi sosial (Weeks 2011). Akibatnya, permasalahan yang muncul akibat kerja sering kali penyelesaiannya diserahkan secara individual. Terlebih di era ekonomi digital ini, para pekerja terutama di bidang industri kreatif dihadapkan pada narasi-narasi yang mereduksi risiko-risiko kerja seperti *passion* atau panggilan hidup

yang semakin dibunyikan untuk melanggengkan proses individualisasi kerja. Sebagai ilustrasi, di kalangan pekerja industri media dan industri kreatif, dikenal istilah “kalau belum tibus belum kerja” atau “tidak apa tak tidur asalkan mengerjakan sesuatu sesuai *passion*”. Istilah-istilah ini pada akhirnya menormalisasi kondisi kerja tidak layak yang dialami para pekerja seperti jam kerja berlebihan/*overwork* atau kerja lembur tanpa diupah.

Keputusan atas kerja seseorang pun masih dipahami sebagai pilihan individual daripada sebagai sebuah konsekuensi dari struktur kekuatan politik yang ada (Weeks 2011). Padahal, pilihan-pilihan seseorang atas

pekerjaannya ditentukan oleh berbagai kondisi ekonomi politik yang ada, seperti pasar tenaga kerja fleksibel, akses terhadap pendidikan, termasuk hilangnya ruang hidup di desa akibat pengambilalihan lahan untuk pembangunan infrastruktur (Akram-Lodhi, Kay & Borrás 2012; Standing 1999). Sebagai ilustrasi kita dapat melihat bahwa di Indonesia banyak buruh migran akhirnya terpaksa bekerja ke luar negeri karena terbatasnya pekerjaan yang layak. Sementara itu lahan pertanian di kampung halaman mereka sudah digusur oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan (Solidaritas Perempuan 2014).

Tambahan lagi, bagi perempuan penentuan pilihan kerja pun sebagian besar tidak ditentukan secara demokratis oleh perempuan itu sendiri. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan dikonstruksikan sebagai penanggung jawab dari kerja-kerja reproduksi sosial di dalam rumah tangga/keluarga, berupa kerja-kerja domestik yang intensif semacam membersihkan isi rumah, mencuci pakaian, memasak untuk makan keluarga, mengurus anak, mengatur keuangan keluarga, dan sebagainya (Fraser 2017). Kerja-kerja yang kemudian dikonstruksikan secara sosial sebagai “kerja perempuan” ini pun kemudian ditetapkan sebagai suatu hal yang bersifat “kodrati” bagi perempuan. Sementara itu, laki-laki dikonstruksikan secara sosial sebagai penanggung jawab dari kerja-kerja produksi yang berada di domain publik (Fraser 2017). Terkait itu, dalam tulisan ini, istilah “kerja perempuan” merujuk pada kerja yang dilakukan oleh perempuan, yang secara sosial dikonstruksikan sebagai tanggung jawab perempuan.

Sebagai konsekuensi dari konstruksi sosial tersebut, perempuan pun kemudian mengalami domestikasi sehingga bahkan kerja-kerja perempuan di wilayah produksi pun dipindahkan ke ruang-ruang domestik seperti rumah. Salah satu contohnya dapat dilihat pada fenomena banyaknya pabrik yang memindahkan mesin-mesinnya ke rumah-rumah warga sehingga para buruh, khususnya buruh perempuan, bisa melakukan kerja produksi di dalam rumah sambil melakukan kerja-kerja reproduksi sosial di dalam keluarga mereka (Staples 2007). Bahkan, dengan alasan serupa, domestikasi atas kerja-kerja perempuan pun merasuk ke dalam era digital saat ini. Sebagaimana terlihat dalam fenomena menjamurnya toko daring (dalam jaringan/*online*) di berbagai platform media sosial yang kebanyakan dikelola oleh perempuan—terutama ibu rumah tangga—dari rumah mereka masing-masing (Izzati 2019). Dalam hal ini, kebanyakan perempuan yang terlibat di dalam usaha toko daring tersebut mengaku memilih pekerjaan

ini karena mereka dapat bekerja dari rumah sehingga dapat menambah penghasilan keluarga sembari tetap menunaikan “kewajiban” mereka dalam mengurus anak dan rumah tangga (Izzati 2019). Di sini, kita dapat melihat bahwa pemindahan lokus kerja ke dalam rumah akibat adanya konstruksi mengenai kerja perempuan merentang dari wilayah kerja industri modern (pabrik) hingga pekerjaan wilayah digital (toko daring).

Pemindahan kerja-kerja yang dilakukan perempuan di wilayah produksi ke lokus privat seperti rumah pun kemudian melanggengkan konstruksi sosial bahwa perempuan yang bekerja mencari nafkah di wilayah produktif—yang kebanyakan juga masih menanggung kerja-kerja reproduksi sosial di rumah—ialah pencari nafkah tambahan meskipun pada kenyataannya berperan sebagai tulang punggung keluarga (Elson & Pearson 1981). Dengan kata lain, kerja-kerja yang dilakukan perempuan pun dianggap sebagai komplementer dari pekerjaan laki-laki. Akibatnya, perempuan hampir selalu menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki—yang secara sosial dikonstruksikan sebagai kepala keluarga. Ini dapat dilihat misalnya di dalam data mengenai *gender pay wage gap* (ketimpangan upah berdasarkan gender di seluruh dunia).

Akibat lainnya, perempuan pun menempati posisi yang rentan di dalam pasar tenaga kerja, yang dibuktikan—salah satunya—di dalam feminisasi kerja. Dalam feminisasi kerja, perempuan cenderung diterima dengan mudah di dalam pasar kerja daripada laki-laki karena secara patriarkal, perempuan dikonstruksikan sebagai seorang yang submisif/patuh dan tidak mudah protes jika diberi upah yang rendah atau mengalami kondisi kerja yang tidak layak (Arizpe & Aranda 1981; Elson & Pearson 1981; Mezzadri 2016; Pratap 2014). Sementara di saat yang sama, masuknya perempuan ke dalam pasar tenaga kerja juga disebabkan oleh kondisi perempuan yang cenderung lebih miskin dari laki-laki (Federici 2012).

Kondisi perempuan yang terdomestikasi yang membuat kerja-kerja yang dilakukan oleh perempuan selalu ditempatkan sebagai komplementer dari kerja-kerja laki-laki pun pada akhirnya membuat perempuan cenderung teralienasi atau terasing dari kehidupan sosial yang lebih luas. Akibat terdomestikasi, perempuan cenderung teratomisasi atau terindividualisasi dan dijauhkan dari ide mengenai berserikat dan berkumpul sehingga dijauhkan pula dari pengetahuan mengenai beragam hal, termasuk hak-hak mereka sebagai pekerja dan hak-haknya sebagai warga negara. Sebagai perbandingan, para perempuan yang bekerja di wilayah

produksi, seperti di pabrik-pabrik—selain juga bekerja di wilayah reproduksi sosial di dalam rumah tangga—telah banyak berhasil mengorganisasi diri melalui serikat buruh yang pada akhirnya, melalui serikat yang kuat, dapat secara perlahan mengubah kondisi kerja mereka yang buruk (Silver 2003).

Selain itu, perempuan dianggap tidak memiliki jiwa kepemimpinan, sanggup memimpin atau melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan tanggung jawab publik karena perempuan dipandang hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan “ringan” seperti kerja-kerja domestik di dalam rumah dan bukan pekerjaan “berat” seperti yang dilakukan oleh laki-laki (Dalla-Costa & James 1972).

Berbagai institusi pembangunan, termasuk negara, kemudian banyak membuat program pemberdayaan perempuan—yang menempatkan perempuan sebagai objek—untuk mengatasi bermacam persoalan yang dihadapi kaum perempuan tersebut. Namun, para sarjana feminis seperti Sardenberg (2008, h. 18) menyoroti pemberdayaan yang dilakukan oleh institusi-institusi pembangunan tersebut yang ia sebut sebagai *liberal empowerment* atau pemberdayaan yang liberal. Menurutnya, pemberdayaan yang liberal tersebut banyak melupakan keterlibatan secara langsung dari perempuan itu sendiri. Akibatnya, pemberdayaan perempuan justru jauh dari kepentingan perempuan, terutama yang paling dimarginalkan. Oleh karena itu, untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih demokratis bagi perempuan dalam menentukan berbagai pilihannya, baik dalam soal kerja maupun soal-soal lain dalam kehidupan yang lebih luas, diperlukan adanya pemberdayaan yang membebaskan (*liberating empowerment*) (Sardenberg 2008, h. 19).

Terkait itu, tulisan ini ingin menjawab persoalan seputar kerja perempuan kaitannya dengan persoalan pemberdayaan yang liberal dengan mengajukan dua tesis utama. Pertama, jawaban atas persoalan mengenai kerja perempuan ialah pemberdayaan yang membebaskan, dan bukan pemberdayaan yang liberal sebagaimana diluncurkan oleh hampir semua institusi pembangunan. Kedua, langkah untuk mewujudkan pemberdayaan yang membebaskan dapat dimulai dengan proses demokratisasi kerja yang merujuk pada proses sosialisasi kerja—yang dikonstruksikan sebagai kerja yang bersifat “kodrati” bagi perempuan—kepada masyarakat (Federici 2012; Rowbotham 2010). Tulisan ini melihat bahwa demokratisasi kerja tersebut dapat membuat perempuan terlibat aktif dalam berbagai ruang-ruang demokrasi, termasuk gerakan pemberdayaan perempuan yang membebaskan. Selain itu, tulisan ini juga melihat bahwa

demokratisasi kerja merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan yang membebaskan itu sendiri. Dengan kata lain, proses demokratisasi kerja di dalam masyarakat dapat mengantarkan atau menjadi pintu pembuka bagi pembebasan perempuan yang sesungguhnya.

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, tulisan ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif karena kelebihanannya dalam menyediakan penjelasan yang mendalam mengenai fenomena-fenomena sosial (Bryman 2008). Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif (Bryman 2008; Delamont 2013).

Observasi dan wawancara dilakukan di sebuah desa di Majalaya, Jawa Barat pada bulan Juli 2017. Pemilihan desa tersebut sebagai lokasi penelitian didasarkan karena kebanyakan perempuan di desa tersebut bekerja sebagai buruh pabrik *sweater* dan kaos kaki di bawah sistem kerja *putting-out-system*. Dalam *putting-out-system*, para buruh perempuan melakukan pekerjaan sebagaimana yang dilakukan buruh di dalam pabrik. Namun, dalam sistem ini, mesin-mesin pabrik dipindahkan ke rumah dan para buruh perempuan pun mengerjakan pekerjaan mereka dari dalam rumah (Fajerman 2013).

Di Majalaya, *putting-out-system* sendiri lebih dikenal dengan istilah *maklun*, yang diambil dari bahasa Belanda *makloon* yang berarti upah atau ongkos produksi (Safaria 2003, h. 79). Dalam sistem ini, perusahaan/pabrik menyubkontrakan mesin-mesin mereka kepada warga desa yang berperan sebagai pemilik unit usaha sehingga buruh yang bekerja di bawah sistem kerja ini menghadapi ketidakpastian status kerja (Safaria 2003).

Wawancara dilakukan kepada tujuh orang informan. Empat di antaranya merupakan buruh perempuan yang bekerja di bawah sistem kerja *putting-out-system*, sedang tiga lainnya ialah aktivis (laki-laki) serikat buruh yang ada di sana. Sementara studi kepustakaan telah dimulai sejak tahun 2017.

Tulisan ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Setelah pendahuluan, persoalan yang akan dibahas pertamanya ialah mengenai ‘kerja perempuan’ dan keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang demokrasi. Setelah itu, pada bagian kedua tulisan ini akan membahas kaitan antara demokratisasi kerja dan pemberdayaan perempuan yang membebaskan. Tulisan ini akan ditutup dengan sebuah kesimpulan mengenai kaitan antara problem kerja perempuan dan ide mengenai demokratisasi kerja untuk pemberdayaan perempuan yang membebaskan.

“Kerja Perempuan” dan Keterlibatan Perempuan dalam Berbagai Ruang Demokrasi

Konstruksi atas kerja perempuan yang mengalienasi perempuan dari kehidupan sosial dan dianggap sebagai suatu hal yang kodrati tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Di dalam kapitalisme yang berkelindan erat dengan patriarki, tidak ada aspek demokratis dalam penentuan kerja perempuan (Bhattacharya 2017; Federici 2012; Fraser 2017; Mies 1998; Mohandesi & Teitelman 2017). Kultur kapitalis yang menginterpretasikan atau mengorganisasi *motherhood* dalam cara yang menekankan perbedaan seksual dan mengantarkannya pada *sexual asymmetry*—lah yang menjadi penyebab utama (Coontz 1986, h. 12). Di Indonesia, konstruksi sosial yang patriarkal pun menetapkan bahwa kerja perempuan berada di seputar sumur, dapur, kasur (Rahayu 2015). Terkait itu, dalam era kapitalisme, pekerjaan-pekerjaan di seputar sumur, dapur, kasur itu berada dalam wilayah kerja reproduksi sosial.

Kerja-kerja reproduksi sosial di dalam domain rumah tangga/keluarga seperti memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, hingga mengurus anak dan suami, selalu ditempatkan sebagai kerja yang gratis dan bahkan tidak dianggap sebagai kerja, meski memiliki posisi yang vital di dalam kapitalisme (Fraser 2017; Mohandesi & Teitelman 2017). Dalam hal ini, hanya melalui kerja-kerja reproduksi sosiallah kapitalisme dapat memastikan keberlangsungannya. Kapitalisme tidak dapat memproduksi tenaga kerja, baik tenaga kerja siap pakai, maupun tenaga kerja cadangan (*reserve army of labour*), tanpa adanya kerja reproduksi sosial (Fraser 2017; Mies 1998). Selain itu, kerja-kerja yang diupah—seperti kerja produksi dan kerja reproduksi sosial yang tidak berada di dalam domain keluarga, misalnya kerja mengajar di sekolah atau kerja perawat di rumah sakit—tidak dapat ada tanpa keberadaan kerja reproduksi sosial di rumah yang tidak diupah (Fraser 2017; Mies 1998). Meski demikian, para kapitalis lepas tangan dari tanggung jawab atas kerja reproduksi sosial dan memindahkannya ke dalam institusi keluarga (Fraser 2017).

Terkait itu, konstruksi atas kerja reproduksi sosial sebagai kerja perempuan ini membuat kerja-kerja yang bersifat reproduktif kemudian lebih sering dilihat sebagai aktivitas merawat/ memelihara sesuatu daripada sebagai sebuah kerja. Akibatnya, kerja reproduksi sosial terutama di dalam wilayah rumah tangga/keluarga selalu menjadi kerja perempuan yang tersembunyi, yang dikompensasikan dengan retorika cinta dan kebajikan yang diberikan oleh perempuan untuk keluarga (Fraser

2017, h. 23; Staples 2007). Padahal, pekerjaan-pekerjaan reproduksi sosial di dalam rumah tangga/keluarga itu tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan di waktu luang/*leisure activities* (Federici 2006). Terkait itu, pada kenyataannya, pekerjaan-pekerjaan reproduksi sosial di dalam rumah tangga/keluarga, seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, mengurus anak, dan sebagainya, merupakan pekerjaan-pekerjaan intensif yang menyita waktu (Izzati 2019). Oleh karena itu, ia tidak bisa dikatakan sebagai *affective labour*/kerja afektif atau kerja yang bersifat emosional semata (Federici 2006).

Menurut Federici (2006, h. 6), pengategorian kerja-kerja reproduktif—termasuk kerja reproduksi sosial—sebagai kerja afektif, sebagaimana diteorikan oleh Negri dan Hardt, hanya membawa kerja-kerja reproduktif kembali kepada mistifikasi atasnya: yakni bahwa orang-orang yang melakukan kerja-kerja ini hanyalah memproduksi “emosi” dan “perasaan” yang dengan demikian menegaskan posisi kerja-kerja reproduktif yang vital dalam akumulasi kapital.

Sebagai konsekuensi dari disembunyikannya kerja-kerja reproduksi sosial di dalam rumah tangga/keluarga dari konteks politik dan masyarakat yang lebih luas, wilayah domestik pun kemudian menjadi sebuah lokus resmi dari kerja perempuan (Fraser 2017). Akibatnya, ketika bekerja di wilayah produktif, perempuan hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Oleh karena itu, dengan menggunakan analogi dari Graeber (2018, h. 15), kerja perempuan dalam reproduksi sosial di rumah tangga dapat dikategorikan sebagai ‘*shit job*’ yakni perempuan bekerja dengan sangat keras namun berada di dalam kepercayaan diri yang rendah persis karena alasan itu. Kesenjangan upah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di hampir seluruh belahan dunia pun menunjukkan betapa latennya konstruksi atas kerja perempuan tersebut berdampak pada kondisi kerja dan kesejahteraan perempuan (Mohanty 2003). Lebih jauh, berbagai konsepsi terkait perburuhan di dalam kapitalisme pun cenderung diasosiasikan sebagai kerja produktif—produksi nilai lebih—yang didominasi oleh laki-laki (Mies 1998).

Oleh karena itu, perempuan pun menempati posisi yang rentan di dalam pasar kerja. Konstruksi patriarkis yang meletakkan posisi perempuan sebagai pekerja yang dianggap patuh dan tidak akan mudah melakukan protes atas kondisi kerja yang buruk telah menjadi narasi utama dari proses yang disebut dengan feminisasi kerja (Arizpe 1981; Elson & Pearson 1981; Mezzadri 2016; Pratap 2014). Terkait itu, feminisasi kerja menjelaskan sebuah

proses ekstraksi nilai lebih yang didukung oleh nilai-nilai patriarkal (Mezzadri 2016). Dalam hal ini, proses feminisasi kerja ada bersamaan dengan proses intensif dari ekstraksi nilai lebih dari kebanyakan perempuan yang mengalami kerentanan (Mezzadri 2016). Dalam feminisasi kerja, perempuan masuk dan terlibat di dalam pasar kerja karena konstruksi patriarkal yang melekat padanya serta kondisi kemiskinan yang dialami perempuan (Mezzadri 2016). Dengan kata lain, feminisasi kerja menyoal pada masuknya perempuan ke dalam pasar kerja akibat nilai-nilai patriarki yang berlaku di dalam masyarakat, serta kondisi material kehidupan perempuan yang cenderung lebih miskin daripada laki-laki.

Sehubungan dengan itu, feminisasi kerja memperdalam beban kerja ganda perempuan, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang kelas pekerja miskin (Mezzadri 2016). Dalam hal ini, perempuan yang masuk ke dalam mekanisme feminisasi kerja kebanyakan merupakan perempuan kelas pekerja miskin. Para perempuan ini menanggung beban kerja ganda yang cenderung lebih berat dibandingkan dengan para perempuan pekerja kelas menengah di perkotaan. Sebagai ilustrasi, para perempuan pekerja kelas menengah perkotaan di Indonesia cenderung lebih mampu merekrut pekerja rumah tangga untuk membantu kerja-kerja reproduksi sosial mereka di dalam rumah. Sementara itu, sebagian besar para pekerja perempuan yang merupakan kelas pekerja miskin, mengerjakan kerja-kerja reproduksi sosial di dalam rumah mereka setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya di wilayah produksi atau reproduksi sosial di luar rumah (Izzati 2019).

Kondisi ini pun mengalami intensifikasi seiring dengan kemunculan *home-based work*/kerja berbasis rumah yang sekaligus menunjukkan sisi dari kapitalisme yang sangat adaptif dengan kondisi masyarakat yang patriarkal. Ide mengenai rumah sebagai tempat kerja yang fleksibel bagi perempuan yang dapat membuat perempuan terlibat di dalam kerja-kerja yang produktif ketika mengurus anak-anak dan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya pun telah memunculkan *home-based work* yang didominasi oleh perempuan (Staples 2007). Terkait itu, pernyataan Mies (1998, h. 38) menjadi tepat dan akurat bahwa, "Kapitalisme tidak dapat berfungsi tanpa patriarki."

Dalam konteks ini, kapitalisme pun memanfaatkan konstruksi patriarkis yang melekat pada perempuan dalam sistem kerja lainnya, yakni *putting-out-system* (Fajerman 2013; Staples 2007). Dalam *putting-out-system*, perusahaan menyubkontrakan mesin-mesin pabrik ke

rumah-rumah warga. Alasannya, agar para perempuan tersebut dapat bekerja dari rumah secara fleksibel sembari mengurus anak dan keluarga mereka (ET 2017, wawancara 15 Juli 2017; RS 2017, wawancara 14 Juli 2017). Namun, pada kenyataannya para perempuan tersebut tetap bekerja seharian sebagaimana ketika mereka bekerja di dalam pabrik (ET 2017, wawancara 15 Juli).

Malah, dengan adanya *putting-out-system* ini para buruh diharuskan untuk menanggung risiko kecelakaan kerja mereka sendiri. Sebagai ilustrasi, seorang buruh perempuan di Majalaya yang bekerja di bawah sistem kerja ini mengatakan bahwa ketika ia tertusuk jarum, ia harus membeli obat merah dengan menggunakan uang sendiri dan ia tidak dapat meminta ganti ke perusahaan yang membawahi maklun tempat ia bekerja (ET 2017, wawancara 15 Juli). Fenomena ini mengindikasikan perusahaan menerapkan sistem kerja tersebut untuk mengalihkan tanggung jawab atas segala biaya dan risiko kepada para buruh.

Hal sama namun dalam bentuk berbeda juga terjadi pada mereka yang bekerja di toko-toko daring. Sebagian dari mereka bekerja sebagai *reseller* berbagai produk dengan membuka toko daring via akun media sosial mereka masing-masing, seperti di *Facebook* dan *Instagram*; sebagian lainnya menjadi *dropshipper*; atau sebagai pekerja di toko daring itu sendiri (Izzati 2019). Banyak perempuan, termasuk ibu rumah tangga, masuk dan terlibat di dalam bisnis toko daring karena membayangkan fleksibilitas yang bisa didapatkan jika mengerjakan pekerjaan tersebut dari rumah melalui ponsel pintar mereka (Izzati, 2019). Namun, hal itu tidak terjadi karena pada kenyataannya mengelola bisnis memerlukan perhatian penuh dan tidak bisa disandingkan dengan kerja-kerja reproduksi sosial di rumah dan begitu pula sebaliknya.

Konstruksi kerja perempuan yang kemudian menghasilkan berbagai sistem kerja yang mendomestikasi perempuan tersebut membuat para perempuan yang bekerja di dalamnya tidak memiliki kesempatan untuk terlibat aktif di dalam ruang-ruang demokrasi yang ada. Mereka tidak berserikat karena diatomisasi dalam ruang-ruang rumah sendiri alih-alih berada di dalam satu tempat kerja. Mereka juga tidak dapat terlibat aktif di dalam gerakan perempuan atau gerakan sosial lainnya karena disibukkan dengan beban kerja perempuan dalam keseharian mereka. Pengatomisasian ini pada akhirnya juga menjauhkan perempuan dari pengetahuannya akan hak-haknya sebagai buruh, warga negara dan lain sebagainya. Akibatnya, buruh perempuan situasinya

lebih rentan dibandingkan buruh laki-laki. Selain itu, sebagai warga negara perempuan juga cenderung terpinggirkan dalam ruang-ruang demokrasi keseharian yang lebih luas, termasuk di dalam gerakan perempuan itu sendiri.

Di sisi lain, tidak semua buruh perempuan yang bekerja di wilayah produksi ikut tergabung di dalam serikat (Arifin 2015). Ketika berserikat pun, kebanyakan buruh perempuan menghadapi kendala untuk terlibat aktif di dalam serikat karena beban kerja ganda—di wilayah produksi dan reproduksi sosial—yang mereka tanggung amat menyita waktu dan hidup mereka (Arifin 2015). Lebih jauh, jumlah perempuan yang menjadi pemimpin dalam serikat atau organisasi sosial lainnya masih sangat terbatas (Arifin 2015). Lagi-lagi, konstruksi atas kerja perempuan menjadi akar masalahnya. Konstruksi atas kerja perempuan yang menempatkan kerja-kerja perempuan di wilayah reproduksi sosial di dalam rumah tangga bukan sebagai kerja serta kerja-kerja perempuan di wilayah produksi sebagai pekerjaan tambahan semata, mengakibatkan perempuan cenderung dianggap tidak memiliki jiwa kepemimpinan, sanggup memimpin atau dapat membuat sebuah keputusan bagi organisasi. Jauh berbeda dengan laki-laki yang hampir selalu dianggap sebagai pemimpin dalam setiap kesempatan dan secara umum dianggap memiliki jiwa kepemimpinan, hanya karena dianggap melakukan pekerjaan berat di wilayah produksi, bukan pekerjaan remeh-temeh seperti mencuci, membereskan rumah atau memasak, sebagaimana dikerjakan oleh perempuan di dalam rumah tangga/keluarga (Dalla-Costa & James 1972).

Upaya Menuju Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan Melalui Demokratisasi Kerja

Untuk mengatasi berbagai permasalahan perempuan tersebut, berbagai institusi pembangunan—seperti Bank Dunia, Internasional Monetary Fund (IMF) juga negara—kemudian seperti berlomba-lomba meluncurkan beragam program pemberdayaan perempuan, dari mulai mikro kredit untuk perempuan, hingga program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan (Keating, Rasmussen & Rishi 2010). Model program pemberdayaan seperti itu pun menjadi standar dari konsep pemberdayaan perempuan yang dikenal secara luas.

Beberapa sarjana feminis melakukan kritik atas model pemberdayaan perempuan yang menjadi standar secara global tersebut. Menurut Sardenberg (2008, h. 18), ide mengenai pemberdayaan perempuan pada awalnya berasal dari pemikiran feminis. Namun, pada perkembangannya, istilah pemberdayaan telah

diadopsi oleh pemerintah dan berbagai institusi pembangunan internasional untuk memaksakan agenda dan kepentingan mereka atas perempuan. Ia memberi istilah pemberdayaan jenis ini sebagai pemberdayaan yang liberal. Sardenberg (2008) menilai bahwa berbagai lembaga pembangunan yang menerapkan pemberdayaan yang liberal ini selalu memandang pemberdayaan perempuan sebagai sebuah instrumen untuk melancarkan berbagai prioritas dalam pembangunan, termasuk dalam hal penghapusan kemiskinan.

Menurut Sardenberg (2008), pemberdayaan yang liberal ini sejalan dengan ide-ide liberal yang berfokus terutama pada pertumbuhan/perkembangan individu, tetapi dalam perspektif yang atomistik atau individualis, artinya aksi dan tindakan yang dilakukan oleh aktor sosial didasarkan pada kepentingan individual. Pada jenis pemberdayaan yang liberal ini, berbagai upaya pemberdayaan perempuan sering kali menempatkan perempuan sebagai objek yang pasif sehingga dalam pendekatan ini, terjadi proses depolitisasi perempuan (Sardenberg 2008). Dalam hal ini, model pemberdayaan yang liberal selalu mengasumsikan bahwa kaum perempuan dan kelompok-kelompok marginal lain yang berada di negara-negara berkembang sebagai pihak yang tidak dapat bersuara dan tidak dapat menolong dirinya sendiri (Mohanty 1988; Sardenberg 2008).

Dalam hal ini, berbagai program pemberdayaan perempuan yang diluncurkan oleh institusi-institusi pembangunan tersebut kebanyakan menempatkan perempuan sebagai konsumen dari program-program yang mereka buat dan rancang. Salah satu program yang ada di dalam pendekatan pemberdayaan yang liberal misalnya program pembangunan yang mengajak perempuan untuk lebih banyak terlibat dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan jenis ini melihat bahwa hanya melalui pasar kerja dan situs produksilah, perempuan dapat terberdayakan (Razavi & Miller 1995). Padahal, pengalaman perempuan di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara dunia ketiga, menunjukkan bahwa perempuan dapat berdaya di bidang selain ekonomi (McEwan 2001).

Orientasi pemberdayaan yang liberal yang dicanangkan oleh lembaga-lembaga pembangunan tersebut cenderung memaksakan konsep pemberdayaan kepada perempuan daripada mencari tahu makna dari pemberdayaan menurut perempuan itu sendiri (Sardenberg 2018). Pemberdayaan yang dipaksakan oleh lembaga-lembaga pembangunan itu pun mengandung paradoks. Di satu sisi, berbagai lembaga pembangunan

tersebut ingin memberdayakan perempuan. Namun, pada saat yang sama, ketimpangan dan peminggiran yang dirasakan oleh perempuan merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang dihasilkan lembaga internasional tersebut. Di sinilah paradoksnya: lembaga-lembaga pembangunan yang sama yang menghasilkan adanya relasi yang timpang bagi perempuan itu ingin memberdayakan perempuan melalui berbagai program, di antaranya program mikro kredit dan kewirausahaan (Keating, Rasmussen & Rishi 2010).

Dalam program mikro kredit, pemberdayaan yang liberal dapat dilihat pada cara berbagai lembaga pembangunan tersebut menyediakan akses terhadap modal dan pasar bagi perempuan di negara-negara berkembang. Akses terhadap modal ini kemudian digunakan oleh para perempuan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, yang sebetulnya disubsidi oleh negara sebelum adanya *Structural Adjustments Programs* (SAPs) atau program-program penyesuaian struktural (Keating, Rasmussen & Rishi 2010). SAPs merupakan konsekuensi dari neoliberalisme. Dalam hal ini, setiap negara yang mendapatkan bantuan dana pembangunan dari berbagai lembaga pembangunan internasional harus menjalankan program-program SAPs di negara masing-masing. Salah satu bentuk dari program SAPs ialah pemangkasan subsidi (Davis 2004).

Oleh karena itu, inisiatif ini menurut Keating, Rasmussen & Rishi (2010) tak lain ialah upaya untuk mengindividualisasi sekaligus mendepolitisasi kemiskinan dan neoliberalisme. Sementara itu, melalui program kewirausahaan, para perempuan di negara-negara berkembang didorong untuk memiliki pekerjaan dan menjadi *self-employed/wiraswasta*. Hal ini secara esensial juga membentuk pandangan bahwa kemiskinan adalah persoalan personal dan bukan persoalan struktural dari pembangunan kapitalisme (Keating, Rasmussen & Rishi 2010). Dalam pendekatan pemberdayaan yang liberal ini, masyarakat (termasuk perempuan) diharuskan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Artinya jika mereka miskin, hal itu dikarenakan mereka kurang memiliki jiwa kewirausahaan (Harvey 2005; Hickey 2010).

Secara umum, agenda pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pembangunan tersebut menyediakan gimik bagi solusi berdasarkan pasar dalam mengatasi kemiskinan. Program-program pemberdayaan perempuan yang ada kemudian berangkat dari posisi seolah-olah perempuan tidak memiliki agendanya sendiri. Sementara itu, kaum

perempuan memiliki kepentingan (*women's interest*) dan agenda (*women's question*) mereka sendiri (Mies 1998). Dalam pemberdayaan yang liberal ini, beragam kepentingan dan agenda perempuan tidak diperhatikan karena perempuan dikategorikan sebagai entitas yang homogen/tunggal, terlepas dari perbedaan geografis dan perbedaan kelas (Mohanty 1988). Lebih jauh, pemberdayaan yang liberal juga tidak bermaksud menciptakan transformasi untuk mengubah kondisi yang timpang di dalam masyarakat yang menyebabkan peminggiran perempuan itu sendiri (Sardenberg 2008).

Oleh karena itu, penting untuk melampaui pemberdayaan liberal ini dengan mewujudkan pemberdayaan yang membebaskan (Sardenberg 2008, h. 23). Tujuan dari pemberdayaan yang membebaskan ialah penghapusan patriarki serta relasi yang menyebabkan ketimpangan lainnya dengan otonomi perempuan sebagai instrumen utama (Sardenberg 2008). Fokus dari pemberdayaan yang membebaskan ini adalah pengorganisasian perempuan dan aksi-aksi kolektif perempuan, meski tetap tidak menafikan pentingnya pemberdayaan perempuan di level individu (Sardenberg 2008). Dalam hal ini, kunci dari pemberdayaan yang membebaskan ialah keterlibatan aktif dari kaum perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, keterlibatan aktif dari kaum perempuan untuk menghidupkan ruang-ruang demokrasi—seperti serikat dan gerakan-gerakan sosial termasuk gerakan perempuan—menjadi kunci dari pemberdayaan yang membebaskan tersebut.

Namun, adanya pembagian kerja yang tidak demokratis di tengah masyarakat telah membuat perempuan kehilangan banyak kesempatan untuk terlibat aktif di dalam ruang-ruang demokrasi, termasuk di dalam gerakan perempuan itu sendiri. Perhatian perempuan kemudian hanya tersita pada kerja-kerja reproduksi sosial di rumah tangga/keluarga atau kerja-kerja mereka di wilayah produksi yang juga masih dibebani dengan kerja reproduksi sosial di dalam rumah tangga/keluarga mereka. Oleh sebab itu, penting untuk memulai langkah pemberdayaan perempuan yang membebaskan dengan proses demokratisasi kerja yang merujuk pada proses sosialisasi kerja—yang dikonstruksikan sebagai kerja yang bersifat kodrati bagi perempuan—sebagai tanggung jawab bersama di dalam masyarakat. Dalam hal ini, pengalihan kerja perempuan dari wilayah privat ke wilayah publik tidak dapat menyelesaikan akar dari permasalahan ketimpangan relasi yang ada (Dalla-Costa & James 1972). Penghilangan fungsi-fungsi kodrati perempuanlah yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

Di Italia, para perempuan yang tergabung dalam gerakan sosial telah mengawali perjuangan demokratisasi kerja ini melalui perjuangan *wages for housework* atau upah bagi kerja-kerja reproduksi sosial di dalam rumah tangga sejak tahun 1970-an (Mayday Rooms 2019). Sementara itu, di negara-negara Skandinavia, ide untuk mendemokratisasi kerja dapat dilihat melalui banyaknya *day care*/tempat penitipan anak yang disediakan negara di berbagai tempat (Chung 2016). Adanya cuti hamil yang diberikan bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki, juga merupakan langkah penting dalam proses demokratisasi kerja, sebagaimana ditunjukkan di negara Swedia (Dhani 2017). Dengan adanya cuti untuk laki-laki/pasangan yang melahirkan seperti di Swedia, proses demokratisasi kerja bisa dimulai secara praktis, yakni tanggung jawab mengurus anak tidak lagi hanya diserahkan kepada perempuan, tetapi dikerjakan bersama-sama dengan laki-laki/pasangannya.

Dengan dimulainya usaha-usaha seperti itu, proses demokratisasi kerja dalam bentuk pembagian ulang kerja di dalam masyarakat berupa sosialisasi kerja-kerja reproduksi sosial akan semakin mudah menemui jalan keberhasilannya. Sosialisasi kerja-kerja reproduksi sosial agar menjadi tanggung jawab bersama masyarakat merupakan kunci dari demokratisasi kerja karena beberapa alasan. Pertama, ia dapat mengubah konstruksi kerja perempuan itu sendiri (Federici 2012; Rowbotham 2010). Kedua, demokratisasi kerja dapat menjadi kondisi material yang membuat perempuan dapat menentukan berbagai pilihannya, termasuk pilihan mengenai kerja, secara lebih leluasa dan bebas. Dengan adanya demokratisasi kerja seperti ini, perempuan bisa terbebas dari problem beban ganda yang selama ini menghambat keterlibatan perempuan dalam berbagai ruang demokrasi, termasuk dalam gerakan perempuan yang membebaskan. Di sisi lain, proses demokratisasi kerja juga dapat dikatakan merupakan bentuk dari pembebasan perempuan itu sendiri karena demokratisasi kerja mensyaratkan adanya perubahan relasi sosial di dalam masyarakat.

Dengan adanya demokratisasi kerja, perempuan tidak akan lagi berkutat hanya pada berbagai persoalan yang berada di wilayah kerja-kerja domestik di dalam rumah, melainkan pada persoalan-persoalan lain yang juga masih membelenggu hidup perempuan. Demokratisasi kerja akan membuat perempuan bisa terlibat aktif dalam gerakan pembebasan perempuan karena perempuan tidak lagi terjebak pada konstruksi kerja perempuan yang membelenggu. Dengan adanya demokratisasi kerja ini, perempuan dapat lebih leluasa dalam

berkumpul, berserikat, dan bergerak secara kolektif untuk menyuarakan berbagai kepentingan dan agenda perempuan. Dengan demikian, perempuan pun dapat melakukan transformasi terkait kondisi kehidupannya, termasuk melakukan perlawanan terhadap pasar kerja fleksibel, feminisasi kerja, dan berbagai diskriminasi terhadap perempuan, sehingga perempuan dapat terlibat secara penuh dalam demokrasi keseharian (Rowbotham 2010), yang akan mengantarkan pada pembebasan perempuan yang sesungguhnya.

Penutup

Di dalam masyarakat kapitalis yang patriarkal, perempuan tidak pernah menentukan pilihan atas kerja mereka secara demokratis. Kerja perempuan yang dikonstruksikan secara patriarkal sebagai kerja-kerja yang berada di wilayah reproduksi sosial kemudian dianggap sebagai kerja yang bersifat kodrati bagi perempuan. Konsekuensinya, kerja perempuan pun cenderung mengalami domestikasi yakni kerja-kerja perempuan di wilayah produksi pun dipindahkan ke ruang-ruang domestik seperti rumah. Ini dapat dilihat dalam fenomena *putting-out-system*, *home-based work*, hingga bisnis toko daring.

Hasilnya, perempuan pun berada pada posisi yang rentan di dalam pasar tenaga kerja, yang dapat dilihat misalnya melalui feminisasi kerja. Selain itu, perempuan juga dijauhkan dari ide mengenai berserikat dan berkumpul karena diatomisasi dalam ruang-ruang di dalam rumah masing-masing. Di sisi lain, belum banyak perempuan yang bekerja di wilayah produksi ikut tergabung di dalam serikat. Bahkan, setelah berserikat perempuan menghadapi kendala untuk terlibat aktif karena perempuan menanggung beban kerja ganda yang menyita waktu. Akibatnya, perempuan pun berada dalam posisi yang lebih rentan daripada laki-laki. Selain itu perempuan juga terpinggirkan dalam ruang-ruang demokrasi keseharian yang lebih luas, tidak terkecuali dari gerakan perempuan itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan tersebut, berbagai program pemberdayaan perempuan diluncurkan oleh berbagai institusi pembangunan, termasuk negara. Namun, beragam program pemberdayaan perempuan tersebut justru banyak mengabaikan keterlibatan dari perempuan itu sendiri. Akibatnya, pemberdayaan perempuan pun justru jauh dari kepentingan perempuan, terutama yang paling dimarginalkan. Lebih jauh, pemberdayaan yang disebut juga sebagai pemberdayaan yang liberal ini juga

mendepolitisasi dan mengatomisasi perempuan sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan agendanya sendiri.

Oleh karena itu, para sarjana feminis yang mengkritisi pemberdayaan yang liberal kemudian menyerukan pentingnya melawan konsep pemberdayaan tersebut dengan mewujudkan pemberdayaan yang membebaskan. Tujuannya, untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih demokratis bagi perempuan sehingga perempuan dapat menentukan berbagai pilihannya secara demokratis, baik yang menyangkut persoalan kerja maupun berbagai persoalan lain dalam kehidupan perempuan. Terkait itu, proses demokratisasi kerja dalam bentuk sosialisasi kerja perempuan sebagai tanggung jawab bersama masyarakat dan bukan perempuan semata merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membuka jalan bagi pemberdayaan yang membebaskan perempuan.

Daftar Pustaka

- Akram-Lodhi, AH, Kay, C & Borras, SM 2012, "The Political Economy of Land and the Agrarian Question in the Era of Neoliberal Globalization", dalam AH Akram-Lodhi & C Kay (eds.), *Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*, Routledge, London, hh. 214-238.
- Arifin, S 2015, "Perempuan dan Serikat Buruh", *Majalah Perburuhan Sedane*, dilihat 22 April 2019, <http://majalahsedane.org/perempuan-dan-serikat-buruh/>
- Arizpe, L & Aranda, J 1981, "The 'Comparative Advantages' of Women's Disadvantages: Women Workers in the Strawberry Export Agribusiness in Mexico", *Signs*, vol. 7, no. 2, hh. 453-473.
- Bhattacharya, T (ed.) 2017, *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression*, Pluto Press, London.
- Borras Jr, SM & Franco, J 2012, "Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis", *Journal of Agrarian Change*, vol. 12, no. 1, hh. 34-59.
- Bryman, A 2008, *Social Research Methods*, edisi ketiga, Oxford University Press, Inc, New York.
- Chung, H 2016, "What Britain can learn from Scandinavia when it comes to childcare", *The Conversation*, dilihat 14 November 2016, <http://theconversation.com/what-britain-can-learn-from-scandinavia-when-it-comes-to-childcare-68459>
- Coontz, S & Henderson, P 1986, "Introduction: 'Explanations' of Male Dominance", dalam S Coontz & P Henderson (eds.), *Women's Work Men's Property: The Origins of Gender and Class*, Verso, London.
- Dalla-Costa, M & James, S 1972, *The Power of Women and the Subversion of the Community*, Falling Walls Press Ltd, Bristol.
- Davis, Mike 2004, "Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat", *New Left Review*, vol. 26, March-April, hh. 5-34.
- Delamont, S 2013, "Ethnography and participant observation", dalam C Seale, G Gobo, JF Gubrium & D Silverman (eds.), *Qualitative Research Practice*, SAGE Publications, California.
- Dhani, A 2017, "Macam-macam cuti melahirkan, dari 3 bulan hingga setahun", *Tirto.id*, dilihat 10 Juli 2017, <https://tirto.id/macam-macam-cuti-melahirkan-dari-3-bulan-hingga-setahun-csnn>
- Elson, D & Pearson, R 1981, "Nimble Fingers Make Cheap Workers': An Analysis of Women's Employment in Third World Export Manufacturing", *Feminist Review*, vol. 7, hh. 87-107.
- Fajerman, M 2013, *Review of the Regulatory Framework for Homeworkers in Indonesia*, International Labour Organization, Jakarta.
- Federici, S 2006, "Precarious Labor: A Feminist Viewpoint", dilihat 20 Maret 2019, <http://inthemiddleofthewhirlwind.wordpress.com/precarius-labor-a-feminist-viewpoint/>
- Federici, S 2012, *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*, PM Press.
- Fraser, N 2017, "Crisis of Care? On the Social Reproductive Contradictions of Contemporary Capitalism", dalam T Bhattacharya (ed.), *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression*, Pluto Press, London, hh. 2-36.
- Graeber, D 2018, *Bullshit Jobs*, Allen Lane, Great Britain.
- Harvey, D 2005, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, Inc, New York.
- Hickey, S 2010, "The Government of Chronic Poverty: From Exclusion to Citizenship?", *Development Studies*, vol. 46, no. 7, hh. 1139-1155.
- Hopkins, CT 2017, "Mostly Work, Little Pay: Social Reproduction, Migration, and Paid Domestic Work in Montreal", dalam T Bhattacharya (ed.), *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression*, Pluto Press, London, hh. 131-147.
- Izzati, FF 2019, "Frauen im Daringgeschäft: Zwischen Hausarbeit und Zweitjob", *Südosiasien*, dilihat 1 April 2019, <https://suedostasien.net/frauen-im-daringgeschaeft-zwischen-hausarbeit-und-zweitjob/>
- Keating, C, Rasmussen, C & Rishi P 2010, "The Rationality of Empowerment: Microcredit, Accumulation by Dispossession, and the Gendered Economy", *Signs (Feminists Theorize International Political Economy Special Issue)*, vol. 36, no. 1, hh. 153-176.
- Mayday Rooms, dilihat 22 Maret 2019, <https://maydayrooms.omeka.net/>
- McEwan, C 2001, "Post colonialism, feminism and development: intersections and dilemmas", *Progress in Development Studies*, vol. 1, no.2, hh. 93-111.
- Mezzadri, A 2016, "Class, gender and the sweatshop: On the nexus between labour commodification and exploitation", *Third World Quarterly*, vol. 37, no. 10, hh. 1877-1900.
- Mies, M 1998, *Patriarchy & Accumulation on a World Scale*, Zed Books, Ltd, New York.
- Mohandesi, S & Teitelman, E 2017, "Without Reserves", dalam T Bhattacharya (ed.), *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression*, Pluto Press, London, hh. 37-67.
- Mohanty, CT 2003, "'Under Western Eyes' Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles", *Signs*, vol. 28, no. 2, hh. 499-535.

Mohanty, CT 1988, "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses", *Feminist Review*, issue 30, hh. 61-88.

Pratap, S 2014, *Emerging Trends in Factory Asia: International Capital Mobility, Global Value Chains and the Labour Movement*, Asia Monitor Resource Centre, Hongkong.

Rahayu, AW 2015, "Perempuan dan Belunggu Peran Kultural", *Jurnal Perempuan*, dilihat 22 April 2019, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/perempuan-dan-belunggu-peran-kultural>

Razavi, S & Miller, C 1995, *From WID to GAD: Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse*.

Rowbotham, S 2010, *Dreamers of A New Day: Women Who Invented the Twentieth Century*, Verso, London.

Safaria, AF 2003, "Makna Welfare dan Well-Being bagi Buruh Informal (Studi Kasus Buruh Subkontrak di Industri Tekstil Majalaya, Jawa Barat)", *Jurnal Analisis Sosial*, vol. 8, no. 3, hh. 77-96.

Sardenberg, CMB 2008, "Liberal vs. Liberating Empowerment: A Latin American Feminist Perspective on Conceptualising Women's Empowerment", *IDS Bulletin*, vol. 39, no.6, hh. 18-27.

Silver, BJ 2003, *Forces of Labour: Workers Movements and Globalization Since 1870*, Cambridge University Press.

Solidaritas Perempuan 2014, "Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan keluarganya di Negara ASEAN, Laporan Hasil Pemetaan di Wilayah: Mataram, Sumbawa, Kendari, Makassar, Palu, Karawang", Solidaritas Perempuan, Jakarta.

Standing, G 1999, "Global Feminization through Flexible Labor: A Theme Revisited", *World Development*, vol. 27, no. 3, hh. 583-602.

Staples, DE 2007, *No Place Like Home: Organizing Home-Based Labor in the Era of Structural Adjustment*, Taylor & Francis e-Library.

Weeks, K 2011, *The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries*, Duke University Press, London.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Dr. Widjanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
6. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

